

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian terkait problematika implementasi program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dilakukan oleh komponen-komponen pelaksana yang meliputi penyuluh, ketua kelompok tani, KPL, BRI dan kepala desa. Pelaksanaan program kartu tani belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan arah kebijakan dan SOP yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Walaupun demikian, pelaksana kebijakan kartu tani selalu berupaya untuk menjalankan peran dan wewenangnya dalam mencapai tujuan kebijakan program kartu tani. Pelaksanaan kartu tani dimulai pada tahun 2017, sedangkan masa penggunaan kartu tani dilaksanakan pada tahun 2018. Pelaksanaan program kartu tani masih terdapat beberapa permasalahan baik teknis maupun non teknis. Permasalahan teknis terjadi pada setiap tahapan proses kartu tani. Aspek non teknis berkaitan dengan kompetensi dan kesiapan SDM baik pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran (petani).
2. Permasalahan pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang secara mendasar disederhanakan dalam 4 variabel

problem. Variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang secara berkesinambungan menjadikan problematika implementasi menjadi kompleks. Artinya permasalahan tersebut tidak serta merta dapat diatasi dengan mengatasi pada satu variabel permasalahan. Adanya perubahan dalam transmisi informasi dikarenakan kurangnya sosialisasi kartu tani yang menjadikan rendahnya pengetahuan petani dalam memahami manfaat dan mekanisme kartu tani. Kurangnya pengetahuan menjadikan sikap pelaksana di lapangan belum sepenuhnya mendukung program kartu tani. Sumberdaya-sumberdaya pendukung yang belum dapat memenuhi kebutuhan dalam mekanisme kartu tani terlihat pada aspek kualitas maupun kuantitas. Kurangnya kompetensi dan motivasi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dikarenakan kurang adanya SOP atau petunjuk pelaksanaan yang jelas untuk menjelaskan adanya suatu konsekuensi tugas dan tanggungjawab serta sanksi atas wewenang yang melekat. Perbedaan-perbedaan pemahaman pelaksana kebijakan dalam menafsirkan atau menginterpretasikan aturan kartu tani menjadikan pelaksanaan koordinasi belum saling terintegrasi dengan optimal.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melihat hasil penelitian terkait implementasi dan problematika implementasi program kartu tani di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dengan meningkatkan intensitas sosialisasi, menyediakan sumberdaya-sumberdaya pendukung, mengevaluasi keberjalanan program kartu tani dan menyelesaikan permasalahan subsidi pupuk secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Secara praktis maka saran yang dapat diberikan seperti:
 - a. Mengoptimalkan penyediaan sarana prasarana dengan menyelesaikan penuntasan pencetakan kartu tani baik periode pertama maupun periode kedua, memastikan ketersediaan dan keberfungsian EDC bagi KPL, mendorong KPL membuat rekening bank untuk menunjang pengisian saldo kartu tani di KPL.
 - b. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi termasuk dalam ketepatan waktu penyaluran, pemenuhan jumlah alokasi yang diberikan, penerapan HET ditingkat KPL dan ketepatan yang lain sesuai asas 6 tepat.
 - c. Melakukan perbaikan penggunaan kartu tani dengan melibatkan pemangku kebijakan, pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran
2. Mempertimbangkan hasil-hasil evaluasi dan kondisi di lapangan tentang komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi serta pelaksanaan program kartu tani di wilayah Kecamatan Bonang. Memberikan ruang opsional untuk konsep-konsep dalam penyelesaian permasalahan pupuk subsidi. Mempertimbangkan konsep-konsep pertanian serta analisis disiplin ilmu lain yang terkait seperti penguatan konsep dinamika

kelompok tani, konsep kepemilikan lahan, serta konsep subsidi atau bantuan langsung tepat sasaran. Adanya penguatan konseptual dan pertimbangan sosial budaya ekonomi politik dan hukum akan memberikan alternatif kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peningkatan produksi dan produktivitas petani serta menjunjung pertanian berkelanjutan. Secara praktis saran yang dapat diberikan seperti:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan pengkomunikasian program kartu tani kepada pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran melalui kegiatan sosialisasi ataupun kunjungan lapangan secara rutin dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan pengenalan program kartu tani melalui media-media yang sesuai dengan kondisi kelompok sasaran sehingga dapat diulas kembali oleh kelompok sasaran pada lingkup yang lebih kecil.
- c. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia baik di tingkat pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran sehingga dapat secara mandiri dapat melaksanakan dan mengaplikasikan program kartu tani.
- d. Memberikan dukungan kepada penyuluh untuk pendataan dan pengusulan kartu tani bagi petani dengan pengalokasian biaya operasional yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- e. Memberikan dorongan, apresiasi maupun insentif kepada pelaksana kebijakan atas pencapaian pengaplikasian program kartu tani baik

berupa insentif materiil maupun non materiil sebagai stimulasi bagi penggunaan kartu tani ditingkat kelompok sasaran.

- f. Meningkatkan kesadaran dari pemangku kebijakan, pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam mekanisme program kartu tani.
- g. Membuat dan menerapkan payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan program kartu tani baik ditingkat pusat hingga tingkat bawah termasuk juga pemberian sanksi bagi komponen kebijakan yang melanggar kewajibannya.
- h. Meningkatkan dan mengaktifkan koordinasi serta pengawasan penyaluran pupuk subsidi yang melibatkan pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kelompok sasaran serta mengefektifkan peran KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk bersubsidi dan Pestisida) di tingkat bawah.